

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kota Padang. Berdasarkan temuan dan analisis peneliti, penelitian ini menghasilkan Kesimpulan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kota Padang menunjukkan indikasi belum optimal sehingga perlu ditingkatkan lagi. Hal yang dapat dilihat dari variabel yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, disposisi, serta kondisi sosial, ekonomi dan politik. Dapat dilihat dari beberapa variabel berikut:

a. Ukuran dan tujuan kebijakan

Ukuran dan tujuan kebijakan ini memiliki dua indikator pengukuran yaitu jelas dan terukur serta keadilan. Apabila dilihat dari indikator jelas dan terukur, tujuan dari kebijakan ini telah dijelaskan dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 109 Tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah. Akan tetapi tujuan dari kebijakan ini belum bisa tercapai dengan maksimal dikarenakan pengelolaan sampah dari sumber sampah belum terlaksana dengan baik. Pengelolaan sampah dari sumber

sampah yaitu pemilahan sampah yang dilakukan oleh masyarakat belum dilakukan secara maksimal, sehingga sampah yang dihasilkan masyarakat semuanya masih dibuang ke tempat pembuangan sementara. Selanjutnya apabila dilihat dari indikator keadilan juga masih belum tercapai, hal ini dikarenakan belum semua kelompok sasaran yang mendapatkan informasi mengenai kebijakan ini. Dalam hal ini sosialisasi terkait pengelolaan sampah belum merata ke semua masyarakat Kota Padang.

b. Sumber daya kebijakan

Sumber daya manusia dalam kebijakan ini merupakan pegawai Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan implementor dari kebijakan ini dan masyarakat Kota Padang yang merupakan sasaran dari kebijakan ini. Sumber daya manusia dalam pengimplementasian kebijakan ini masih kurang di bagian sosialisasi. Sumber daya manusia yang ada di Dinas Lingkungan Hidup untuk melaksanakan sosialisasi adalah sebanyak 4 orang yang mana ini sangatlah sedikit, jika melihat banyaknya wilayah yang harus didatangi untuk sosialisasi. Sementara itu sumber daya manusia dari petugas kebersihan juga kurang, jumlah petugas kebersihan yang ada pada saat ini tidak sebanding dengan jumlah kecamatan yang ada di Kota Padang, sehingga untuk saat ini sumber daya manusia yang ada hanya bisa dimaksimalkan. Sedangkan sumber daya manusia dari masyarakat sangat kurang sekali, masih banyak masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam pengelolaan sampah dari sumber sampah. Masih banyak dari masyarakat yang tidak peduli dengan pengelolaan sampah ini. Selanjutnya indikator sumber daya non manusia seperti

anggaran yang berasal dari APBD Kota Padang belum memadai sehingga sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan kebijakan ini juga masih kurang. Dan juga anggaran yang ada untuk sosialisasi juga kurang, sehingga sosialisasi tidak bisa dilakukan secara merata.

c. Karakteristik agen pelaksana

Struktur birokrasi yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dalam melakukan kebijakan ini memiliki rentang kendali yang tidak terlalu panjang sehingga cukup sederhana dan tidak berbelit-belit. Kemudian untuk norma-norma yang berlaku dalam implementasi kebijakan ini mengacu pada jalur pendekatan pegawai negeri sipil dan etika pegawai, yang mana budaya ini tidak menghambat jalannya kebijakan. Sedangkan pola-pola hubungan yang terjadi dalam organisasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang berjalan baik dan tidak memiliki masalah. Sehingga pada variabel ini dapat disimpulkan bahwa karakteristik agen pelaksana tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

d. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

Komunikasi yang ada di dalam internal Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang berjalan dengan cukup baik dikarenakan selalu dilakukannya rapat rutin mingguan antara kepala dinas dengan pegawai dinas tersebut. Sementara komunikasi dan koordinasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dengan lingkungan eksternalnya yaitu bank sampah dan juga lembaga pengelola sampah juga berjalan dengan sangat baik. Dengan bank sampah dinas selalu melakukan

komunikasi dan koordinasi terkait sosialisasi yang akan diadakan. Sementara dengan LPS komunikasi dan koordinasi yang dilakukan juga berjalan dengan lancar karena LPS harus selalu melapor ke dinas.

e. Disposisi

Sikap implementor terhadap kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga ini sangat mendukung implementasi kebijakan ini. Selain itu implementor juga paham terhadap kebijakan yang mereka lakukan, serta implementor memiliki harapan untuk memperbaiki kekurangan pada kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga ini.

f. Kondisi sosial, ekonomi dan politik

Respon masyarakat terhadap kebijakan ini ada yang menerima dan ada yang tidak. Dapat dilihat dari indikator kondisi sosial masyarakat masih banyak yang tidak ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah ini. Sedangkan jika dilihat pada kondisi ekonomi, dilihat pada pembayaran retribusi sampah masyarakat menengah ke atas mau membayar berapapun karena rata-rata mereka tidak memilah sampah dan sampah yang dihasilkan langsung dibuang semuanya. Sementara masyarakat ekonomi menengah kebawah sebaliknya, mereka membayar retribusi dengan nominal yang lebih rendah dan beberapa ada yang melakukan pemilahan dan kemudian menyetor sampah yang telah dipilah tersebut ke bank sampah, sehingga mereka juga mendapatkan untung dari hasil menabung sampah. Untuk dukungan dari elit politik dalam kegiatan pengelolaan sampah ini adalah berupa perizinan

dalam pelaksanaan kegiatan seperti sosialisasi dan anggaran yang disediakan untuk pengelolaan sampah, akan tetapi dukungan berupa anggaran ini masih kurang sehingga pelaksanaan kebijakan belum dilaksanakan secara maksimal.

## 6.2 Saran

Berdasarkan Kesimpulan dari hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kota Padang yang telah peneliti paparkan di atas, maka dapat diberikan saran-saran yang diharapkan mampu memperbaiki implementasi tentang kebijakan ini:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang harus lebih intens mengadakan sosialisasi tentang pengelolaan sampah agar masyarakat dapat mengetahui tata cara pengolahan sampah yang dimulai dari sumber sampah.
2. Dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, diperlukan penambahan sumber daya manusia untuk sosialisasi dan sumber daya lainnya yang perlu dipenuhi dan dicukupkan sesuai dengan kebutuhan dan standar yang ditetapkan.
3. Perlu adanya dukungan anggaran yang lebih agar proses pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga serta sosialisasi yang dilakukan dapat berjalan dengan lebih baik.
4. Masyarakat harus berpartisipasi maksimal dalam pengelolaan sampah seperti menabung di bank sampah yang ada di Kota Padang dan terlibat dalam proses pemilahan, pemanfaatan dan pendauran ulang sampah.

5. Pihak yang berpartisipasi dalam sosialisasi pengelolaan sampah harus berpartisipasi aktif untuk menyampaikan informasi yang didapatkan kepada masyarakat sekitar agar tujuan kebijakan pengelolaan sampah dapat tercapai.
6. Dinas Lingkungan Hidup harus bekerja sama dengan semua organisasi persampahan untuk meningkatkan pengelolaan sampah ini.

